

BAB III

ANALISIS PEMBERDAYAAN PERAN DAN FUNGSI KECAMATAN DI KECAMATAN BANJARMANGU KABUPATEN BANJARNEGARA PASCA DITETAPKANNYA PERATURAN DAERAH NO 18 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KECAMATAN KABUPATEN BANJARNEGARA

Penerapan desentralisasi dan otonomi daerah (UU No 22 Tahun 1999 dan UU No. 32 Tahun 2004) turut merubah peran dan fungsi kecamatan. Camat yang semula menjadi kepala wilayah atau sering disebut dengan Bupati kecil yang membawahi wilayah yang berada dibawahnya, sekarang beralih fungsi menjadi bagian dari satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang tidak lagi memiliki kewenangan penuh terhadap wilayahnya. Hal ini merupakan konsekuensi logis dari “proses desentralisasi dan otonomi daerah” yang menghendaki demokratisasi dan partisipasi dalam birokrasi publik.

Dalam hal ini adalah birokrasi kecamatan. Dengan adanya transparansi dan partisipasi publik, diharapkan agar birokrasi Kecamatan dapat melayani publik secara terbuka, adil dan sebaik-baiknya. Kemudian untuk membantu Pemerintah Kabupaten dalam melaksanakan tugas otonominya dan dalam rangka memberdayakan Kecamatan, Pemerintah Kabupaten Banjarnegara perlu mendelegasikan sebagian kewenangannya kepada Kecamatan yang dimaksudkan demi mendekatkan pelayanan kepada masyarakat.¹

Pada tahun 2002, Kecamatan Banjarmangu belum menjadi SKPD dan belum mengatur adminstrasinya sendiri, praktis pendelegasian wewenang secara

¹Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan dan kelurahan dan Peraturan Daerah Nomor 18 tahun 2008 tentang tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan.

teknis belum berjalan.² Hal ini dimaklumi sebagai proses dari masa transisi dari sistem yang sentralistik menuju sistem desentralistik yang didalamnya terjadi berbagai perubahan-perubahan yang tidak mudah dapat diatasi dalam kurun waktu singkat terutama untuk Kabupaten Banjarnegara yang sejak masa Pemerintahan sistem sentralistik tergolong Kabupaten yang kurang berdaya.

Pemerintah Daerah Kabupaten Banjarnegara memerlukan beberapa waktu dalam melaksanakan pendelegasian kewenangan ke Kecamatan. Baru sejak tahun 2010 sampai sekarang, Kecamatan-kecamatan yang berada di wilayah Kabupaten Banjarnegara telah menjadi SKPD dan memiliki organisasi adminstratifnya sendiri. Kemudian Pola yang digunakan dalam pendelegasian kewenangan kepada Kecamatan-Kecamatan di Banjarnegara adalah pola Seragam.³ Yaitu pendelegasian sebagian kewenangan Bupati kepada Camat secara seragam dan mengabaikan karakteristik wilayah dan penduduknya. Kebijakan ini kurang tepat, karena pola yang seragam berarti menyeragamkan pula apa yang sebenarnya tidak sama. Kabupaten Banjarnegara adalah Kabupaten heterogen. Baik secara geografis maupun populasinya.

Seperti dalam jumlah populasi, Kecamatan Banjarmangu relatif lebih banyak jika dibandingkan dengan populasi di Kecamatan Punggelan. Kecamatan Punggelan berbeda dengan Kecamatan Karangobar dalam hal geografis maupun populasinya begitupun kecamatan-kecamatan lain yang berada di wilayah Kabupaten Banjarnegara berbeda satu sama lain. Pendelegasian pola seragam bagi

²Wawancara dengan Camat Banjarmangu Kab.Banjarnegara Bpk. Agus Kusuma tgl 13 juni 2013

³Sadu Wastiono, Ismail Nurdin M. Fahrurozi : perkembangan Organisasi Kecamatan Dari Masa ke Masa

Pemerintah Kabupaten Banjarnegara, diharapkan akan dengan mudah mengidentifikasi berbagai kendala-kendala yang muncul manakala proses pendelegasian berlangsung dan pada saat Kecamatan menjalankan kewenangan yang telah didelegasikan. Pola keseragaman ini juga dapat dilihat dari sudut pandang anggaran yang dialokasikan.

Menurut wawancara penulis dengan bagian tata Pemerintahan Kabupaten Banjarnegara Bapak Sagiyo, bahwa Anggaran yang dialokasikan di Kecamatan-Kecamatan di Banjarnegara di sama-ratakan.⁴ Tetapi kebijakan ini tidak efektif. Tipologi kecamatan yang berbeda seharusnya alokasi dana juga berbeda. Mengingat anggaran ikut berperan penting dalam pemberdayaan Kecamatan, maka pertimbangan seharusnya berpijak kepada estimasi yang rasional, bahwa Kecamatan yang relatif luas dan dengan penduduk yang banyak, tentu harus mendapat alokasi yang lebih pula. Sejak tahun 2002 sampai saat ini anggaran yang dialokasikan masih tetap berpijak pada konsep “keseragaman”. Dengan demikian bisa dipahami bahwa kebijakan keseragaman ini termasuk kebijakan yang memengaruhi pemberdayaan peran dan fungsi Kecamatan.

Pada Tahun 2010 Berdasarkan ketentuan Pasal 15 Ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008, Pemerintah Banjarnegara telah mendelegasikan kewenangan kepada Kecamatan. kewenangan tersebut meliputi: kewenangan perijinan, rekomendasi, koordinasi, pembinaan, pengawasan, fasilitasi, penetapan, pengumpulan data, penyampaian informasi, dan kewenangan penyelenggaraan. Dari kesembilan kewenangan yang telah didelegasikan, khusus

⁴Wawancara dengan bagian Tata Pemerintahan Kab.Banjarnegara Bpk.Sagiyo tgl 08 juli 2013

untuk kewenangan perijinan baru direalisasikan pada tahun 2012 sejalan diterbitkannya Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 11 Tahun 2012. Tetapi, yang boleh menerbitkan kewenangan perijinan baru lima Kecamatan. Diantaranya Kecamatan Punggelan, Kecamatan Sigaluh, Kecamatan Susukan, Kecamatan Karangobar dan Kecamatan Batur. Sedangkan di Kecamatan Banjarmangu sendiri belum dapat meleaksanakan kewenangan perijinan. Bentuk kewenangan perijinan ini seperti ijin mendirikan bangunan (IMB) yaitu yang berskala kurang lebih seluas (50m). Kemudian perbengkelan sepeda motor, pengepulan kayu, salon dan perijinan usaha lain.

**A. PROGRAM-PROGRAM YANG TELAH DILAKSANAKAN
KECAMATAN BANJARMANGU SEBAGAI BENTUK
PEMBERDAYAAN KECAMATAN.**

Untuk melaksanakan tugas-tugas pelayanan yang terencana dan sistematis sesuai dengan tugas pelimpahan wewenang yang telah diberikan, yang bertujuan untuk mengoptimisasi pemberdayaan kecamatan dan memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada masyarakat, maka Pemerintah Kecamatan mempunyai tugas⁵:

- a. Penyiapan penyusunan program program kerja kecamatan
- b. Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat
- c. Pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum

⁵Program Kerja Camat Banjarmangu, Kabupaten Banjarnegara Tahun 2010

- d. Pengkoordinasian penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan,
- e. Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum
- f. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ditingkat Kecamatan
- g. Pembinaan Penyelenggaraan pemerintahan desa dan/kelurahan
- h. Pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/ atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan Desa atau Kelurahan
- i. Pelaksanaan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, yang meliputi aspek perizinan, rekomendasi, koordinasi, pembinaan, pengawasan, fasilitasi, penetapan, penyelenggaraan dan kewenangan lain yang dilimpahkan
- j. Pengelolaan kesekretariatan Kecamatan
- k. Penginventarisan permasalahan dan pelaporan pelaksanaan tugas Kecamatan
- l. Pelaksanaan tugas dan kedinasaan lain yang diberikan Bupati sesuai tugas dan Fungsi Camat.

Dan sebagai bentuk organisasi Pemerintahan yang menjalankan tugas-tugas dan fungsinya, maka penulis telah memperoleh data dari program-program Kecamatan yang telah dilaksanakan. Tiap Aparatur

menjalankan fungsinya masing-masing dan tidak terlepas dari tugas pokok dan fungsi yang telah ditetapkan. Tugas-tugas dan fungsi ini mengacu kepada program yang telah direalisasikan. Berikut program-program tersebut:⁶

A. Camat

Dalam bidang pemerintahan pelaksanaannya adalah:

1. Melaksanakan kegiatan Musrenbang (Musyawarah rencana pembangunan) tingkat Kecamatan yang diadakan setahun dua kali bersama tokoh Desa, Perangkat Desa maupun BPD yang telah diberi kewenangan untuk melaksanakan musyawarah tersebut.
2. Melakukan fungsi Fasilitasi
Memfasilitasi kegiatan pemberdayaan masyarakat desa, pemberdayaan organisasi Kecamatan dan lain-lain.
3. Melakukan fungsi Pembinaan secara rutin
Camat melakukan pembinaan secara rutin kepada bawahannya dalam menjalankan tugas pokok yang telah dijalankan. Baik berupa pembinaan langsung maupun tidak langsung.

B. Sekeretariat Camat

Beberapa hal yang sudah dilaksanakan sekretariat kecamatan banjarmangu adalah sebgai berikut :

a. Sub bagian Perencanaan dan Keuangan

1. pembuatan program kerja setiap tahunnya

⁶Program Kerja Camat Banjarmangu kabupaten Banjarnegara 2010

2. tersusunnya laporan kegiatan camat
3. Terlaksananya pembuatan LAKIP Tahun 2009 dengan mengacu pada renstra yang disesuaikan dengan potensi dan kondisi kecamatan serta laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati (LKPJ).
4. Tersusunnya RKA – SKPD, DPA – SKPD dan DPPA –SKPD Tahun 2010
5. Melaksanakan pencairan anggaran untuk Belanja Gaji dan Tunjangan Pegawai, penghasilan lain pegawai serta Belanja Kegiatan di Kecamatan sesuai ketentuan yang berlaku untuk mendukung tertib administrasi keuangan Kecamatan.
6. Terlaksananya pertanggungjawaban penggunaan anggaran dan membuat laporan keuangan yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah, SKPD dan catatan atas Laporan Keuangan.
7. Melaporkan kehadiran setiap bulannya.

b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

1. Terealisasinya kenaikan pangkat dan kenaikan gaji berkala tepat waktu:
 - Kenaikan pangkat : 1 orang
 - Kenaikan berkala : 7 orang
2. Terealisasinya pembuatan Karpeg 8 orang.
3. Terealisasinya pembuatan Karis/karsu 8 orang.

4. Terealisasinya DP3 Reguler 2 orang.
5. Pemberian pelayanan umum kepada masyarakat seperti Legalisasi Pembuatan KTP 1.025 Pemohon KK sejumlah 446 Pemohon, Legalisasi Pembuatan Akte Kelahiran, Numpang Nikah dan Keterangan Tidak Mampu sejumlah 2.622 Pemohon, Rekomendasi SKCK sejumlah 306 pemohon dan Legalisasi Bank 569.
6. Tersusunnya KIR dan KIB Tahun 2009
7. Terselenggaranya rapat-rapat dinas dan rapat koordinasi sesuai jadwal.
8. Laporan Mekanisme Kepegawaian
9. Laporan Mutasi Barang semester I dan II telah dibuat sesuai jadwal
10. Tersusunnya DUK, Buku Induk pegawai pada tahun 2009.
11. Terisinya buku-buku kepegawaian (buku penjagaan kenaikan pangkat dan kenaikan gaji berkala dan buku kepegawaian lainnya.
12. Jumlah surat masuk 1.225 dan jumlah surat keluar 561.
13. Jumlah keputusan Camat 15 SK.
14. Proposal sejumlah 163 yang merupakan legalisasi dari seluruh wilayah Kecamatan Banjarmangu.

C. Seksi Tata Pemerintahan

Selama kurun waktu tahun 2009 telah berhasil dilaksanakan pengisian perangkat sebagai berikut:

1. Pengisian Perangkat Desa:

- Desa Kendaga
 - a. Pengisian kekosongan dalam Jabatan: Kepala Dusun III
 - b. Pengisian kekosongan dalam jabatan: Kepala Urusan Kerja
 - c. Pengisian Kekosongan Petugas Tehnis lapangan/kayim
- Desa Gripit
Pengisian kekosongan Petugas tehnis lapangan/Kayim
- Desa Prendengan
Pengisian kekosongan dalam jabatan: Kepala Urusan Pembangunan
- Desa Sipedang
Pengisian kekosongan Jabatan kepala Dusun III
- Desa Sijenggung
Pengisian Kekosongan Jabatan Kepala Urusan Umum
- Desa Pekandangan
Pengisian kekosongan jabatan Kepala dusun II
- Desa Kalilunjar
Pengisian kekosongan jabatan Kepala Urusan Umum

2. Pembinaan Perangkat Desa, administrasi kependudukan dan administrasi desa baik melalui Konfrensi Dinas Kepala Desa dan Sekretaris Desa tiap satu bulan sekali maupun dalam kesempatan kunjungan ke desa-desa.
3. Pelunasan PBB Tahun 2009 secara tuntas pada tanggal 27 Februari 2010 dengan urutan ke I (satu) Tingkat Kabupaten.
4. Memfasilitasi dan membina pembuatan Perdes tentang Sumber-sumber Pendapatan Desa, Program Kerja Desa, APBDesa, dan pembuatan LKPJ agar dapat berjalan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.
5. Laporan kependudukan dilaksanakan setiap bulan dari desa serta dihimpun dan dilaporkan ke tingkat Kabupaten Banjarnegara. Adapun jumlah per 31 Desember 2009 laki-laki: 21.995 perempuan: 21.101 jumlah keseluruhan 43.096.
6. Pembuatan KTP sejumlah 22.454 orang, KK 13.972 pemohon.
7. Dalam rangka peringatan HUT Proklamasi Kemerdekaan RI ke 64 dan Hari Jadi Banjarnegara Tahun 2009 maka Kecamatan Banjarmangu mendapatkan duaja Bidang Tata Lakana Perkantoran, duaja Bidang Pemerintahan dan duaja Bidang kesehatan serta Samir juara II bidang Pendidikan.

D. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum

Seksi ketenteraman dan ketertiban umum untuk tahun 2009 disamping banyak menangani tentang permasalahan ketenteraman dan ketertiban umum termasuk memfasilitasi ijin-ijin usaha di seluruh Kecamatan Banjarmangu, juga diwarnai dengan tugas pengamanan dalam

serangkaian kegiatan pemilihan Anggota Legislatif tingkat Kabupaten, Propinsi dan Pusat serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Hasil kinerja dari seksi Ketenteraman dan ketertiban umum banyak langsung menopang harkat hidup dan kebutuhan masyarakat di seluruh wilayah Kecamatan Banjarmasin. Beberapa hal yang telah dilaksanakan kurun waktu 2009 sebagai berikut:

- a. Semakin meningkatnya kesadaran masyarakat tentang Kamtibmas.
- b. Meningkatnya kesadaran Pengusaha untuk mengurus ijin HO.
- c. Sosialisasi IMB.
- d. Pembinaan Hansip/Linmas

Kiranya layak kami di utarakan tentang pelaksanaan intensifikasi dan ekstensifikasi pengurusan ijin HO untuk wilayah Kecamatan Banjarmasin selama tahun 2009 sebagai berikut:

- a. Jumlah yang difasilitasi kecamatan untuk penerbitan ijin usaha sebanyak 80
- b. Jenis usaha antara lain penggilingan padi, pertokoan, garasi/ijin trayek (untuk usaha angkutan), galian C, Paly station, pabrik tahu dan jasa pengobatan/klinik serta salon.
- c. Dalam memberikan pelayanan untuk penerbitan ijin HO kecamatan mengadakan koordinasi dan petunjuk teknis serta

peninjauan lokasi bersama dengan instansi terkait tingkat Kabupaten serta aparat setempat.

- d. Untuk penyuluhan dan sosialisasi tentang ijin usaha ,dilaksanakan pada setiap pertemusu dengan Kepala Desa secara berkala maupun paa kesempatan-kesempatan lain yang memungkinkan.

Untuk masalah Ketenteraman dan Ketertiban Umum dilaksanakan pula pengampuan terhadap masyarakat yang terkena bencana alam, antara lain meliputi tanah longsor tanah bergerak. Keikutsertaan masyarakat secara aktif dalam upaya menjaga dan merehabilitasi ketenteraman dan ketertiban lingkungan, untuk Kecamatan Banjarmangu ditandai dengan jumlah personal hansip limas sejumlah 510 yang tersebar di 17 Desa.

Pembinaan dilaksanakan secara periodik baik yang bersifat regular maupun insidentil.Untuk tahun 2009 personal Hansip Linmas berperan secara positif dalam penyelenggaraan serangkaian kegiatan pengamanan Pemilihan Anggota legislatif baik Pusat, Propinsi maupun Kabupaten serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia.

E. Seksi Pemberdayaan masyarakat Desa

a. Pembangunan Umum

Sejak Tahun anggaran 2009 Kecamatan Banjarmangu telah menerima alokasi bantuan dari pemerintah, baik yang berasal dari APBD Kabupaten, APBD Propinsi maupun APBN dan bantuan-bantuan yang bersifat stimulan dengan swakelola telah berlangsung

dan berhasil menyerap swadaya masyarakat setempat. Hasil kegiatan pembangunan tersebut secara fisik maupun non fisik dan ditunjang administrasi sesuai aturan telah mencapai 100% serta dimanfaatkan oleh masyarakat.

Disamping kegiatan pembangunan yang dibiayai dari Pemerintah, di wilayah Kecamatan Banjarmangu juga telah melaksanakan pembangunan secara swadaya murni masyarakat dari berbagai jenis kegiatan pembangunan yang tersebar pada kelompok-kelompok dan lingkungan hidup.

b. Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan

Dalam upaya peningkatan ekonomi rakyat di Kecamatan Banjarmangu telah dilaksanakan langkah-langkah pemberdayaan ekonomi, baik melalui peningkatan pendukung ekonomi dengan pembukaan simpul-simpul potensi ekonomi serta pembinaan dan upaya perwujudan sektor ekonomi produktif. Hasil kegiatan pembangunan pemberdayaan yang telah dilaksanakan dalam Tahun 2009 adalah sebagaimana berikut ini:

- 1) Pembinaan kelompok tani salak bekerjasama dengan Balai Penyuluh Pertanian Kecamatan Banjarmangu dan lembaga pertanian lain.
- 2) Pembinaan pelaku industri kecil dipedesaan seperti industri genting, kaki guci, sirup jahe wulung, alumunium dan home industri lainnya.

- 3) Pemberian bantuan ternak kambing di Desa Sipedang yang merupakan dana dari pusat dengan total jumlah 100 ekor serta bantuan bagi kelompok-kelompok tani pada masing-masing desa potensial yang diambilkan dari dana ADD.
- 4) Upaya pembuatan gas dari kotoran sapi dari limbah pertanian untuk rumah tangga telah dilaksanakan di Desa Sijenggung dan Pekandangan. Hal ini memberikan dampak positif di bidang ekonomi maupun pengelolaan limbah.

c. Lingkungan Hidup

Pembangunan lingkungan hidup di kecamatan Banjarmangu telah melaksanakan kegiatan penyuluhan-penyuluhan dan pembinaan terhadap masyarakat antara lain:

- 1) Penyuluhan/pembinaan masyarakat dekat hutan dalam upaya penyelamatan hutan (LMDH) dan yang paling berkembang berada di Desa Sijeruk dengan penanaman rumput gajah seluas 3 Ha dan memberikan kemanfaatan kepada masyarakat. Penyuluhan ini bersifat kondisional, tidak dijadwalkan secara rutin/tetap, hanya tergantung kebutuhan saja.
- 2) Penyuluhan penggunaan lahan kritis pada desa-desa yang memiliki tanah gersang (kritis) dalam upaya pemanfaatan lahan kritis dan penyelamatan sumberdaya air serta penanggulangan erosi tanah longsor yang dilakukan setiap

bulan sekali, dipimpin oleh kepala seksi pemberdayaan masyarakat dan desa yang bekerjasama dengan stakeholder yang telah ditentukan.

d. Usulan Ekonomi Desa

Dalam upaya penyelamatan kelompok usaha ekonomi desa telah dilaksanakan pembinaan secara rutin setiap bulannya terhadap kelompok peminjam Simpan Pinjam Perempuan (SPP) dari Program Pengembangan Kecamatan (PPK), kegiatan ini diselenggarakan langsung oleh Unit Pengelola Kegiatan (UPK) dan instansi yang diserahkan tugas dari kabupaten.

e. Kelembagaan

Perencanaan pelaksanaan dan pemberdayaan masyarakat dalam bidang pembangunan mempunyai peran yang penting dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan di tingkat Desa, maka selain adanya kesiapan faktor biaya pembangunan dibutuhkan juga adanya lembaga yang mandiri dan akuntabilitas, untuk hal tersebut di Kecamatan Banjarmangu juga telah dilaksanakan secara rutin setiap bulan sekali pembinaan terhadap Lembaga Perencana Pembangunan dan Pemberdayaan masyarakat (LP3M) di Desa selaku mitra kerja Pemerintah Desa.

F. Seksi Kesejahteraan Masyarakat

Harkat hidup manusia mulai dari lahir sampai dengan kembali ke pangkuan Illahi tentu tidak terlepas dari kebutuhan hidup dari berbagai hal dalam upaya memenuhi kesejahteraan mereka. Bidang Tugas Kesejahteraan Masyarakat, meliputi pengkoordinasian maupun pelaksanaan seluruh rangkaian kegiatan yang bermuara pada kesejahteraan lahir batin. Kegiatan tersebut meliputi bidang pendidikan, kesehatan, keagamaan serta kesejahteraan keluarga.

Demi mencapai tujuan tersebut, Kecamatan bekerja sama dengan instansi vertikal di wilayah kerjanya maupun dengan desa-desa menjalankan berbagai program. Seperti di bidang pendidikan, pemerintah Kecamatan beserta DindikPora Kecamatan Banjarmangu menjalankan program paket C. Program ini bertujuan meningkatkan melek pendidikan di Kecamatan Banjarmangu dan memberi kesempatan yang lebih egaliter dalam membuka akses pendidikan.

Kemudian di bidang Kesehatan, Kecamatan berkoordinasi dan juga memfasilitasi program penyuluhan kesehatan. Seperti POSYANDU (Pos Pelayanan Terpadu) yang rutin di desa-desa di Kecamatan Banjarmangu. Kecamatan Banjarmangu dan stakeholder mendorong kerukunan beragama. Dibidang Kesejahteraan keluarga lebih menekankan kepada memprioritaskan

mensosialisasikan pengembangan pertanian melalui program-program yang difasilitasi kecamatan, mulai dari pembentukan kelompok-kelompok tani sampai dengan pembuatan koperasi berbasis hasil pertanian.

Dalam menjalankan peran dan fungsinya sebagai organisasi pelayan publik, Kecamatan Banjarmangu mengalami berbagai kendala. Berikut kendala dan upaya mengatasi kendala tersebut :

1. Sekretaris Kecamatan

Secara umum kendala yang di hadapi kesekretariatan adalah:

- Sarana dan prasarana dalam hal ini ruangan sekretariat kurang representatif, karena disamping untuk melaksanakan tugas-tugas bidang kesekretariatan juga untuk pelayanan umum kepada masyarakat.
- Pengelolaan kearsipan masih kurang maksimal karena terbatasnya saran penyimpanan (almari, rak, filing cabinet dll).

Upaya mengatasi kendala ini, adalah dengan menggunakan ruang sekretariat sesuai kondisi yang ada, dan mengajukan pengadaan sarana prasaran kearsipan (almari arsip) kepada Camat atau Pemerintah daerah.

2. Seksi Tata Pemerintahan

- Kekosongan Sekretaris Desa Beji belum terisi secara definitive hal tersebut dikarenakan berdasarkan UU No 32 Tahun 2004 pengisian kekosongan Sekdes akan di isi oleh PNS.

- Hambatan yang dialami dalam pembuatan KTP dan KK adalah seringnya pemohon mengganti data diri terutama yang berkaitan dengan tanggal lahir dan nama asli untuk kepentingan yang berbeda sehingga menyulitkan validasi data penduduk Kecamatan Banjarmangu.
- Terbatasnya perangkat hardware/software pembuatan KTP dan KK serta penanganan kewenangan yang berubah dari Tingkat Kecamatan ke Tingkat Kabupaten.

Cara mengatasinya adalah:

- a. mengoptimalkan tenaga staf yang ada dan mengajukan penambahan staf ke tingkat Kabupaten.
- b. Mengingatkan pada setiap konferensi dinas/ sekdes tentang pentingnya melaksanakan tugas sesuai aturan dengan sebaik-baiknya untuk mencapai derajat pelayanan prima.
- c. Memerintahkan kepada kepala Desa Majatengah dan Kepala Desa Beji untuk mengangkat pejabat pelaksana (pj Sekdes) sampai ada pengisian Sekdes dari PNS.
- d. Memberikan informasi kepada masyarakat melalui perangkat desa agar dalam penulisan nama disesuaikan dengan dokumen-dokumen kependudukan yang lain.
- e. Melaksanakan back up data secara rutin.

3. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Masih banyak infrastruktur/sapras yang kurang memadai dalam mendukung dan mempercepat pembangunan dan membuka simpul-simpul ekonomi pedesaan.

Cara mengatasinya yaitu sebagai berikut:

- a. Penyelesaian program dan pembangunan Desa di 17 Desa dengan model pembinaan teknis dan administrasi serta pelaporan.
- b. Mengusulkan pembangunan infrastruktur pedesaan khususnya pada Desa tertinggal.

4. Seksi Kesejahteraan Masyarakat

- Sebagian besar tugas dan Seksi Kesra berada di wilayah pedesaan namun dukungan kendaraan roda II belum tercukupi.
- Pelaksanaan program kejar paket C dihadapkan pada kurangnya kesadaran calon peserta didik dan dana operasional proses belajar mengajar.
- Jumlah Tonase beras yang di terima/lokasi perdesa kurang sebanding dengan jumlah Rumah Tangga Miskin yang ada di wilayah Kecamatan Banjarmasin.

Cara mengatasinya adalah:

- a. Secara terus menerus dalam tiap kesempatan mengadakan sosialisasi kepada masyarakat dan calon peserta didik serta bekerja sama dengan Pemerintah Desa tentang pentingnya pendidikan.

- b. Melalui musyawarah antara perangkat Desa, BPD, LP3M. Ketua Rt/ Rw dan perwakilan KK miskin yang terdaftar sebagai penerima Raskin, menentukan pendistribusian Raskin diperuntukan kepada semua KK miskin yang ada dengan cara rangking.

B. PEMBERDAYAAN DI KECAMATAN BANJARMANGU KABUPATEN BANJARNEGARA

Dalam penelitian ini, konsep pemberdayaan terdiri dari dua sub konsep pemberdayaan, *pertama* kewenangan yang menekankan kepada seberapa besar kewenangan yang didelegasikan Bupati kepada Camat. Semakin besar kewenangan yang didelegasikan maka pemberdayaan semakin optimal. Sub konsep kewenangan memiliki dua indikator yaitu, pendelegasian wewenang dan tingkat improvisasi camat.

Sub konsep *kedua* dari Pemberdayaan adalah menstimulasi menekankan pada mendorong Camat agar menjadi lebih berdaya dalam menjalankan tugasnya. Bentuk dari stimulasi itu adalah pendidikan dan pelatihan Camat dan Aparatur Kecamatan. Pendidikan dan Pelatihan dapat meningkatkan kemampuan Camat dan Aparatur Kecamatan. Sedangkan kebebasan untuk berimprovisasi dapat membuat camat lebih kreatif dan inovatif dalam menjalankan peran dan fungsinya. Semakin tinggi kebebasan melakukan improvisasi, semakin tinggi kualitas pemberdayaannya. Di Kecamatan Banjarmasin, keterbatasan kewenangan menjadi penghambat dalam berimprovisasi yang dilakukan Camat maupun aparaturnya. Camat sendiri tidak memainkan perannya secara maksimal

karena selalu terkendala dengan masalah dana dan kewenangan yang terbatas, dengan demikian penulis menyimpulkan bahwa tingkat improvisasi di kecamatan banjarmangu rendah. Hal ini dibuktikan dengan semakin tidak populernya peran dan fungsi Kecamatan Banjarmangu jika dibandingkan dengan peran Pemerintah Desa. Karena Pemerintah Desa yang sejauh ini menjadi sentral dalam segi pelayanan maupun pelimpahan kewenangan dari Kabupaten.⁷

Pelaksanaan Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 dan peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 membuat perubahan kedudukan lembaga Kecamatan. Sebelumnya Kecamatan merupakan Bagian dari organisasi Pemerintah Pusat (Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974), kemudian sejak ditetapkannya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Kecamatan merupakan bagian dari satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Posisi sebagai perangkat daerah membuat Kecamatan memiliki kewenangan manakala terjadi pendelegasian kewenangan dari Bupati. Dengan demikian, pendelegasian kewenangan dari Bupati kepada Kecamatan memakai landasan hukum Peraturan Bupati. Dalam proses pendelegasian kewenangan, adakalanya terbentur oleh berbagai kendala. Seperti sumber daya manusia dan sarana-prasarana. Lemahnya penguasaan terhadap sumber daya manusia dan sarana-prasana Kecamatan, menyebabkan pendelegasian kewenangan kurang atau tidak berjalan sebagaimana mestinya.

⁷ Wawancara dengan Kepala Desa Majatengah Bpk. Wagiyo 17 juni 2013

Bahwa dengan semakin meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap pelayanan umum yang berkualitas, sederhana, tepat waktu, cepat dan murah, dan untuk lebih mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, perlu memberdayakan Kecamatan sebagai perangkat daerah unsur lini kewilayahan yang berhubungan langsung dengan masyarakat, maka aparatur Pemerintah Kecamatan mau tidak mau harus mampu memahami dan diharapkan dapat mengimbangi kebutuhan masyarakat tersebut.

1. Motivasi Aparatur Kecamatan Banjarmangu

Dalam hal ini Camat sangat berperan penting dalam memotivasi pegawai-pegawai yang ada di kantor kecamatan, baik dalam bentuk bimbingan kerja secara langsung maupun tidak langsung. Penyediaan sarana dan prasarana kerja, penyediaan sumberdaya keuangan pendukung kinerja dan pemberian penghargaan dan hukuman menghendaki adanya komitmen, peranan dan tanggung jawab lebih dari unsur pimpinan organisasi.

“Biasanya saya melakukan kontrol internal terhadap pegawai dikantor secara langsung setiap harinya, apabila mereka mengalami kesulitan dalam pekerjaannya maka mereka tidak segan-segan bertanya dengan saya, dan saya yang sekiranya dianggap lebih tau ya saya berikan bimbingan dan motivasi kepada mereka, dan bagi mereka yang melakukan kesalahan saya akan tegur langsung dengan cara yang sepatasnya”.⁸

Fasilitas yang ada dikantor kecamatan Banjarmangu sangat berpengaruh terhadap kinerja pegawai di kantor tersebut. Untuk itu sarana dan pra sarana yang ada di kantor kecamatan Banjarmangu sangat

⁸Wawancara Camat Banjarmangu tgl 14 juni 2013

membantu pekerjaan mereka sebagai motivasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan terhadap masyarakat.

2. Pendidikan dan Pelatihan (DIKLAT)

Sebagai Pelayan Publik, Kecamatan wajib memaksimalkan kinerja pegawainya sebagaimana telah tertera dalam Kepmenpan Nomor 009 Tahun 2007 tentang standar pelayanan publik. Kantor Kecamatan sebagai salah satu instrument dari pemerintah yang mempunyai tanggung jawab untuk mencatat atau mengetahui perkembangan masyarakat yang berada diwilayahnya. Guna meningkatkan efektivitas pelayanan publik di tingkat kecamatan, maka kinerja pegawai harus ditingkatkan.

Kemampuan aparatur Kecamatan yang memadai berarti akan dapat memaksimalkan pekerjaannya dengan baik sesuai dengan yang telah ditentukan dan direncanakan dalam program kerja. Untuk meningkatkan kemampuan pegawai maka kantor kecamatan Banjarmangu Kabupaten banjarnegara mengikutkan pegawainya dalam pendidikan dan pelatihan dengan bekerjasama dengan Badan Kepegawaian Daerah (BKD).

Menurut Sarundajang (1997 : 214) menyatakan bahwa :

“Pemberdayaan aparatur pemerintah adalah usaha untuk meningkatkan kemampuan melalui pengadaan, pembinaan karier, diklat, sistem penggajian serta pengelolaan administrasi yang dipergunakan kepada pegawai negeri sehingga unsur aparatur negara disertai tugas dalam suatu jabatan”.

Bentuk Pemberdayaan Kecamatan dan Aparatur Kecamatan Banjarmangu yang diselenggarakan antara lain:

1. Pendidikan dan Pelatihan (DIKLAT)

Meningkatkan frekuensi mengikuti diklat untuk meningkatkan keterampilan dan kemampuan yang dilakukan secara bertahap dan berjenjang serta penerapan metode-metode diklat dan pemberian materi-materi diklat yang dilakukan dengan praktis.⁹

- Pendidikan merupakan tugas untuk meningkatkan pengetahuan, pengertian atau sikap para pegawai sehingga mereka dapat lebih menyesuaikan dengan lingkungan kerja mereka. Pendidikan berhubungan dengan menambah pengetahuan umum dan pengertian tentang seluruh lingkungan kerja serta pendidikan merupakan suatu usaha untuk mengembangkan kemampuan berfikir pada seorang pegawai.
- Pelatihan merupakan proses membantu para tenaga kerja untuk memperoleh efektivitas dalam pekerjaan yang sekarang atau yang akan datang melalui pengembangan tindakan, kecakapan, pengetahuan dan sikap yang layak.

Pendidikan dan Pelatihan ini berfungsi meningkatkan kualitas manajerial dan profesionalisme aparatur kecamatan. Pelatihan bersifat Praktis dan pendidikan lebih bersifat teoritis.

⁹Zainun, Ahmad. Manajemen Sumber Daya Manusia, Yogyakarta

Manulang (1962:174) mengatakan bahwa dasar pemikiran dan pelatihan/pendidikan, seyogyanya mencakup tujuh hal pokok sebagai berikut :

- a. Tujuan pelatihan/pendidikan harus disesuaikan dengan kebutuhan organisasi
- b. Materi pelatihan/pendidikan harus relevan dengan realisasi tujuan latihan
- c. Jadwal disusun sehingga kondusif bagi pelatih maupun pengikut pelatihan/pendidikan
- d. Lokasi pelatihan/pendidikan dipilih yang lebih memberikan kegairahan dalam proses pelatihan/pendidikan
- e. Kulalitas dan Kuantitas peserta harus tidak mengganggu pada jalannya pelaksanaan Diklat
- f. Pelatih harus dipilih yang memiliki kualifikasi yang diperlukan
- g. Metode pelatihan harus disesuaikan dengan pengikut pelatihan dan materi yang diberikan.

Sejauh ini Pelatihan yang pernah dilakukan Camat dan aparatur Kecamatan Banjarmangu tertera dalam Tabel berikut:

Tabel 3.1
Pelatihan Camat dan Aparatur Kecamatan Banjarmangu

No	Jabatan	Pelatihan Jabatan
1.	Camat	Adum tahun 1996
2.	Sekcam	Adum 1998 Adumla 2002
3.	Kasi Tapem	Adum 1998
4.	Kasi Trantibun	-
5.	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Adum Thn 1999
6.	Kasubag Perencanaan dan Keuangan	Adum Thn 1999
7.	Kasi Kesra	-
8.	Kasi PMD	-

Sumber : Duk Kecamatan Banjarmangu

Pendidikan dan Pelatihan atau Diklat guna memberdayakan Aparatur Kecamatan Banjarmangu Pada Tabel 3.1 menunjukkan beberapa aparatur kecamatan yang belum sama sekali mengikuti pelatihan (Kasi Trantibun, Kasi Kesra dan Kasi PMD). Hal ini akan berdampak pada kualitas kinerja pegawai yang memungkinkan akan terjadi banyak permasalahan pada berbagai hal menyangkut pelayanan kepada publik.

Pada dasarnya pelatihan sangat penting karena untuk memperbaiki kemampuan pegawai dengan cara meningkatkan kemampuan dan ketrampilan operasional dalam menjalankan tugasnya sehingga dapat berjalan dengan baik.

Tabel 3.2
Pendidikan Camat dan Aparatur Kecamatan Banjarmasin

No	Jabatan	Pendidikan
1.	Camat	S2
2.	Sekcam	S1
3.	Kasi Tapem	Sarjana Muda
4.	Kasi Trantibun	Sarjana Muda
5.	Kasubag Umum dan Kepegawaian	SMA
6.	Kasubag Perencanaan dan Keuangan	SMA
7.	Kasi Kesra	S1
8.	Kasi PMD	Sarjana Muda

Sumber : Duk Kecamatan Banjarmasin

Sumber daya merupakan sesuatu yang penting untuk menunjang pemberdayaan peran dan fungsi camat dan organisasi itu sendiri. Camat tidak akan dapat melaksanakan tugasnya tanpa di dukung oleh sumber daya yang memadai. Kapabilitas SDM kecamatan Banjarmasin dapat

dilihat dari jenjang pendidikan terakhir pegawai kecamatan. Ada beberapa aparatur Kecamatan Banjarmangu yang pendidikannya hanya lulusan SMA (Sekolah Menengah Atas), artinya pegawai di Kecamatan Banjarmangu dalam pengetahuan dan pengalaman kerja belum maksimal, pendidikan sebenarnya dimaksudkan untuk mempersiapkan pegawai untuk masuk ke dalam pasar kerja agar tidak memperburuk pelayanan, jika kualitas sumber daya manusianya bagus maka dengan otomatis kualitas pelayanan publiknya pun akan baik. Pendidikan yang tinggi membuat pegawai kecamatan memiliki keahlian dan pola pikir yang lebih baik daripada pegawai yang memiliki pendidikan yang lebih rendah.

Dalam rangka ketercapaian kinerja yang optimal seorang pegawai harus mampu mengetahui apa yang harus dilakukannya dan bagaimana melakukannya. Hal ini tentu berkaitan erat dengan pengetahuan dan kemampuan yang dimilikinya, baik yang dicapai melalui pendidikan formal, pengalaman, pelatihan dan sebagainya. Pentingnya kemampuan dari pegawai agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan tujuannya. Jika pegawai tidak memiliki kecakapan yang cukup, maka kinerjanya akan tidak maksimal dan berakibat kepada buruknya pelayanan publik.

3. Bekerjasama dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah lainnya dalam memberdayakan Kecamatan baik dari internal maupun eksternal.

Dalam menjalankan tugasnya untuk mencapai tujuan organisasi, Kecamatan Banjarmangu yang dimanifestasikan oleh Camat melakukan hubungan kerja dengan berbagai instansi terkait, antara lain :

a. Hubungan Kerja Camat Banjarmangu dengan Bupati Banjarnegara.

Hubungan kerja Camat Banjarmangu dengan Bupati banjarnegara bersifat hirarkis, karena Camat adalah bawahan dari Bupati. Hal ini berdasarkan dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 Pasal 66 ayat 5 secara tegas disebutkan bahwa "Camat bertanggung jawab kepada Bupati/Walikota melalui Sekretaris Daerah.

b. Dengan Dinas Daerah dan Lembaga teknis lainnya.

Hubungan kerja Camat dengan Dinas Daerah dan atau Lembaga Teknis Daerah bersifat koordinatif dan teknis fungsional. Terlebih lagi di dalam organisasi kecamatan terdapat seksi-seksi yang menjalankan fungsi dinas teknis dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat. Contohnya seksi pemberdayaan masyarakat desa yang termasuk teknis fungsional melakukan kerjasama dengan balai penyuluh pertanian Kecamatan Banjarmangu dalam pembinaan kelompok tani salak.

c. Hubungan dengan Pemerintah Desa.

Hubungan Kerja Camat Banjarmangu dengan pemerintah Desa bersifat koordinatif dan fasilitatif. Tidak ada lagi bersifat hierarkis. Sebagai kesatuan masyarakat yang memiliki kewenangan mengatur dirinya sendiri, secara organisatoris Desa tidak memiliki hubungan hierarkis dengan Kabupaten. Tetapi dilihat dari kepentingannya, terdapat hubungan yang bersifat hierarkis. Prinsip umum yang dipakai ialah bahwa kepentingan masyarakat yang lebih kecil tunduk kepada

kepentingan masyarakat yang lebih luas. Contohnya Kecamatan bersama Perangkat Desa memberdayakan masyarakat desa dalam contoh program kegiatan yaitu mengadakan penyuluhan tentang kesehatan, memfasilitasi serta pembinaan pembuatan Peraturan Desa.

d. Hubungan dengan instansi vertikal yang ada dikecamatan

Hubungan kerja Camat Banjarmangu dengan instansi vertikal dan Dinas Daerah yang ada di kecamatan Banjarmangu tidak otomatis bersifat koordinatif, sebab Camat bukan lagi sebagai kepala wilayah, koordinasi yang dilakukan Camat hanya terhadap Dinas Daerah saja, sedangkan terhadap instansi vertikal yang ada di kecamatan seperti Koramil, PLKB, Polres, sifatnya hubungan kerja biasa.

Hubungan Kerja dengan berbagai instansi yang ada di kecamatan maupun diluar kecamatan, bertujuan untuk memberdayakan peranan kecamatan Banjarmangu agar lebih berdaya sebagai organisasi. Hubungan kerja antara kecamatan dan instansi-instansi yang ada wilayah Kerja Camat maupun diluar, menunjukkan upaya-upaya pendekatan dan koordinasi yang intensif demi memudahkan kinerja organisasi dalam pemberdayaan Kecamatan Banjarmangu itu sendiri. Selain itu, pemberdayaan yang telah dilaksanakan adalah dengan melakukan pemberdayaan internal organisasi, yaitu dengan memprofesionalkan Aparatur Kecamatan melalui pelatihan dan pendidikan (Diklat) yang secara rutin dilaksanakan.

**C. KENDALA PEMBERDAYAAN PERAN DAN FUNGSI
KECAMATAN BANJARMANGU KABUPATEN
BANJARNEGARA PASCA DITETAPKANNYA PERDA NO 18
TAHUN 2008**

Setiap program yang telah dilaksanakan pasti memiliki hambatan atau kendala dalam menjalankan roda pemerintahan di Kecamatan Banjarmangu. Adapun kendala pelimpahan kewenangan dari Bupati ke Kecamatan dalam memberdayakan Kecamatan di Kabupaten Banjarnegara diantaranya adalah bersifat *paradigmatik, pengaruh politik dan profesionalitas kerja, dan anggaran*.¹⁰

Perubahan peran, kedudukan dan fungsi Camat yang dahulu Camat sebagai kepala wilayah (berdasarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974) kini, Camat hanya menjalankan tugas sebagai satuan kerja perangkat pemerintah daerah yang terbatas dan tak memiliki kewenangan lebih dalam menjalankan tugasnya artinya Camat hanya kepangjangan tangan dari Pemerintah Kabupaten. Tetapi, ternyata belum dibarengi dengan pemahaman oleh kebanyakan masyarakat Banjarmangu.

Hal ini dikarenakan sosialisasi baik dari pemerintah Kabupaten maupun Pemerintah Kecamatan yang belum secara optimal mengena sampai ke akar rumput. Terbukti seringnya dijumpai pemahaman bahwa Camat masih menangani sebagian urusan kewilayahan. Mulai dari tanah

¹⁰Wawancara bagian Tata Pemerintahan Kabupaten Banjarnegara dengan Bpk Sagiyo, tanggal 08 July 2013

longsor sampai pembuatan ktp dan lainnya. Situasi seperti ini dinilai mengganggu kinerja Kecamatan. Untuk itu, Sosialisasi kepada masyarakat sangat penting demi merubah paradigma lama tersebut, sehingga masyarakat dapat memahami mana yang menjadi kewenangan Camat dan organisasinya. Untuk menunjang keefektifan sosialisasi, Camat melakukan serangkaian koordinasi dengan Pemerintah Desa. Strategi ini cukup tepat mengingat sebagian besar masyarakat berada diwilayah Desa yang memiliki Pemerintahannya sendiri sehingga mempermudah Camat melakukan sosialisasi tersebut.

Di Banjarnegara, seringkali terjadi politisasi birokrasi. Berdasarkan wawancara dengan narasumber Bapak Sagiyo¹¹, pengambilan Kebijakan terhadap birokrasi Kecamatan sering kali akibat Vis a Vis Pilkada, yang dampaknya penempatan profesi tidak sesuai dengan jabatan. Mereka yang mendukung dan turut memenangkan Bupati dalam pemilihan, seringkali ditempatkan di posisi strategis termasuk di Kecamatan meskipun bukan pada bidang keilmuan atau profesinya. Dengan demikian, tidak benar-benar memperhatikan kompetensi maupun kemampuan.

Kendala yang terakhir adalah anggaran, anggaran yang didistribusikan kepada Kecamatan-kecamatan di Kabupaten Banjarnegara relatif sama dan di sama rata kan. Kebijakan ini dinilai cukup rasional disatu sisi mengingat kemampuan anggaran Pemerintah Kabupaten yang

¹¹ Wawancara dengan Bapak Sagiyo Bagian Tata Pemerintahan, di Kabupaten Banjarnegara, pada tanggal 08 Juli 2013

terbatas. Tetapi disisi lain kebijakan tersebut tidak tepat. Karena setiap Kecamatan berada di geografis yang berbeda dan jumlah populasinya yang tidak sama. Dengan adanya kebijakan “penyamaan anggaran”. Maka Kecamatan-kecamatan yang lebih luas dan populasinya lebih banyak menjadi tidak berdaya. Sementara kebijakkan ini juga tidak efesien. Belum tentu kecamatan yang lebih kecil dan berpopulasi rendah dengan anggaran yang sama dengan kecamatan yang luas dan berpopulasi banyak mampu mengalokasikan anggaranya secara tepat.

Dari hasil observasi yang dilakukan mengenai pemberdayaan peran dan fungsi kecamatan di Kecamatan Banjarmangu Kabupaten Banjarnegara dapat dilihat bahwa upaya dalam memberdayakan peran dan fungsi kecamatan sudah dilakukan, akan tetapi berbagai hal dan kendala yang masih harus diperhatikan mengingat masih banyaknya faktor yang melatarbelakangi proses pemberdayaan peran dan fungsi kecamatan tersebut, seperti kurangnya sumber daya manusia, anggaran, sarana prasarana, serta hal-hal yang menunjang dalam proses pemberdayaan peran dan fungsi kecamatan lainnya.

Selain itu juga, pelimpahan wewenang yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Banjarnegara kepada Kecamatan Banjarmangu hanya berjalan secara praktis dan belum sepenuhnya dijalankan sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah No. 18 Tahun 2008 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Banjarnegara.